



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Iman Bonjol No. 5 Medan - Sumatera Utara

[HOME](#)[SEJARAH](#)[PIMPINAN DEWAN](#)[FRAKSI](#)[KOMISI](#)[ALAT KELENGKAPAN DEWAN](#)[TENTANG DEWAN](#)[SEKRETARIAT DEWAN](#)

RAPAT KERJA DENGAR PENDAPAT GABUNGAN KOMISI B DAN A DENGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Posted February 1, 2019

Written by [user](#)

Category [Umum](#)

RAPAT KERJA/ DENGAR PENDAPAT GABUNGAN KOMISI B DAN A DENGAN DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA PROVSU, BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVSU, DAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVSU



Jum'at, 01 Februari 2019, Komisi B dan A DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja/ dengar pendapat gabungan dengan Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Provsu, Badan Pertanahan Nasional Provsu, dan Badan Pusat Statistik Provsu dengan agenda pembahasan terkait luas lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Utara serta dilaksanakan di ruang rapat Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara (H. Robby Anangga, SE) bertindak sebagai pimpinan rapat dan juga dihadiri oleh Ir. H. Iskandar Sinaga, Jantoguh Damanik, S. Sos, Wasner Sianturi, Richard Pandapotan Sidabutar, SE, dan Inge Amelia Nasution, S.Psi.



Kepala Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Provinsi Sumatera Utara (M. Azhar Harahap) menyampaikan permasalahan terkait SK. Menteri ATR/Kepala BPN No. 399/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Nasional Tahun 2018 sebesar 7.105.145 Ha. Dimana luas lahan sawah Provinsi Sumut sebesar 245.953 Ha. Sedangkan berdasarkan Surat Gubsu No. 520/12249 tanggal 29 November 2018, hasil validasi luas baku sawah sebesar 397.947 Ha. Perbedaan yang signifikan ini berakibat alokasi subsidi dan bantuan dari Pemerintah menjadi tidak tepat. kemudian Perwakilan dari Dinas Pertanahan Nasional (Ismed Syah Alam) menyampaikan dalam waktu dekat akan diadakan kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan berfokus pada perbedaan data tersebut. Ketua BPS menyampaikan bahwa Kementerian ATR menggunakan Citra Satelit untuk mengukur luas baku sawah, sedangkan Pemprovsumu menggunakan GPS untuk mengukur luas baku sawah, sehingga perbedaan data tersebut merupakan hal yang wajar.



Untuk mengatasi masalah ini, Pimpinan rapat menyampaikan untuk mempercepat peninjauan ulang daerah yang beda data secara signifikan. Kemudian agar kepada pihak terkait agar segera mensosialisasikan Perda No. 3 Tahun 2015 dan dibuat turunan Perda tersebut dalam bentuk Pergub ataupun Perbup/Perwal. Pimpinan rapat juga menyampaikan agar membuat Rekomendasi pada pihak yang berwenang agar tetap menggunakan data luas lahan sawah Provinsi Sumut yang lama. Beliau juga menutup rapat ini dan mengatakan sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara akan melakukan koordinasi ke Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian dalam waktu dekat